



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/2576/KP.03.02/VIII/2022 22 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Permohonan Penyampaian Pengumuman
Pendaftaran Seleksi Kepala Perwakilan
Ombudsman RI Tahun 2022

Yth. Rektor Perguruan Tinggi (*daftar terlampir*)

Dalam rangka mendukung visi dan misi serta untuk mendukung peningkatan capaian kinerja Ombudsman Republik Indonesia, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten yang berasal dari perguruan tinggi terbaik.

Sehubungan dengan itu kami bermaksud mengundang Warga Negara Indonesia terbaik dari Perguruan Tinggi Bapak/Ibu untuk mengisi lowongan jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di 6 (enam) provinsi. Periode pendaftaran seleksi dimulai pada tanggal **5 s.d. 29 Agustus 2022**. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui tautan <https://seleksi.ombudsman.go.id/kaper2022>. Adapun persyaratan dan ketentuan pendaftaran bagi pelamar Kepala Perwakilan Ombudsman dengan rincian sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani;
- d. Sehat rohani;
- e. Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif;
- f. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;

- g. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun **pada saat mendaftarkan diri dan berkas diterima oleh Tim Seleksi;**
- h. Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- l. Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Advokat, Notaris, dan/atau Pejabat Pembuat Akte Tanah); dan
- m. Bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia diberhentikan sementara dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil apabila diterima sebagai Kepala Perwakilan.

Untuk lebih jelasnya, bersama surat ini kami sertakan informasi pengumuman pendaftaran melalui tautan berikut <https://ombudsman.go.id/pengumuman>.

Besar harapan kami, insan terbaik dari Perguruan Tinggi Bapak/Ibu dapat bergabung dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas maladministrasi. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon 021 225 137 137 ext 1185 atau melalui email info_seleksikaper@ombudsman.go.id.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia

#

Mokhammad Najih

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Gubernur Provinsi Banten;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Gubernur Provinsi Papua;
6. Gubernur Provinsi Riau;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Lampiran I Surat Dinas
Nomor : B/2576/KP.03.02/VIII/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022

DAFTAR PERGURUAN TINGGI YANG DIKIRIMI SURAT DINAS

A. Provinsi Banten

1. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang;
2. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Kota Serang;
3. Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan;
4. Rektor Universitas Terbuka, Kampus Pusat Daerah Pondok Cabe;
5. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Serang;
6. Rektor Universitas Pelita Harapan, Kota Tangerang;
7. Rektor Universitas Al-Khairiyah, Kota Cilegon;
8. Rektor Universitas Banten Jaya, Kota Serang;
9. Rektor Universitas Bina Bangsa, Kota Serang;
10. Rektor Universitas Bina Nusantara, Kota Tangerang Selatan;
11. Rektor Universitas Faletihan, Kabupaten Serang;
12. Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang;
13. Rektor Universitas Mathla'ul Anwar, Kabupaten Pandeglang;
14. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang;
15. Rektor Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
16. Rektor Universitas Serang Raya, Kota Serang; dan
17. Rektor Universitas Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang.

B. Provinsi Kalimantan Barat

1. Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Rektor Panca Bhakti Pontianak;
3. Rektor IKIP PGRI Pontianak;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak;
5. Rektor IAIN Pontianak;
6. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar; dan
7. Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

C. Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Rektor Universitas Mataram

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Rektor UIN Mataram
4. Rektor Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
5. Rektor STMIK Bumigora Mataram
6. Rektor STIE AMM Mataram
7. Rektor Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram
8. Rektor IKIP Mataram
9. Rektor STIE BIMA
10. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
11. Rektor Sekolah Tinggi Administrasi Muhammadiyah Selong
12. Rektor Sekolah Tinggi Teknologi Hamzanwadi
13. Rektor Universitas Teknologi Sumbawa
14. Rektor Universitas Samawa
15. Rektor Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu
16. Rektor Universitas Teknologi Mataram
17. Rektor Universitas Pendidikan Mandalika
18. Rektor Universitas Islam Al-Azhar

D. Provinsi Papua

1. Rektor Universitas Cenderawasih;
2. Rektor Universitas Musamus Merauke;
3. Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura;
4. Rektor Universitas Yapis Papua;
5. Rektor Universitas Ottow Geissler Jayapura;
6. Rektor STIH Umel Mandiri;
7. Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua; dan
8. Rektor Universitas Muhammadiyah Papua.

E. Provinsi Riau

1. Rektor Politeknik Caltex
2. Rektor Politeknik Negeri Bengkalis
3. Rektor Politeknik Kampar
4. Rektor STAIN Bengkalis Riau
5. Rektor Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persada Bunda

6. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda
7. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purna Graha
8. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau
9. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping
10. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
11. Rektor Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru
12. Rektor STISIP Persada Bunda Pekanbaru
13. Rektor STMIK Amik Riau
14. Rektor STMIK Hang Tuah Pekanbaru
15. Rektor Universitas Abdurrah
16. Rektor Universitas Islam Riau
17. Rektor Universitas Lancang Kuning
18. Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
19. Rektor Universitas Riau
20. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau
21. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau

F. Provinsi Sulawesi Tengah

1. Rektor Universitas Tadulako Palu
2. Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
3. Rektor Universitas Alkhairat Palu
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Palu
5. Rektor Universitas Sintuwu Maroso Poso
6. Rektor Universitas Madako Toli-Toli
7. Rektor STIE Panca Bakti Palu
8. Rektor STIA Pembangunan Palu
9. Rektor Universitas Tompotika Luwuk

Lampiran II Surat Dinas
Nomor : B/2576/KP.03.02/VIII/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR: 26 TAHUN 2022

TENTANG
PENDAFTARAN SELEKSI KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

Ombudsman Republik Indonesia mengundang Warga Negara Indonesia terbaik yang memiliki komitmen dan integritas tinggi sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerja pada Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI	KODE POSISI JABATAN
1.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten	1	KP BANTEN
2.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat	1	KP KALBAR
3.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	KP NTB
4.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua	1	KP PAPUA
5.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau	1	KP RIAU
6.	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah	1	KP SULTENG

II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN:

1. Persyaratan

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani;
- d. Sehat rohani;
- e. Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif;
- f. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;
- g. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun **pada saat mendaftarkan diri dan berkas diterima oleh Panitia;**
- h. Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- l. Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Advokat, Notaris, dan/atau Pejabat Pembuat Akte Tanah); dan
- m. Bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia diberhentikan sementara dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil apabila diterima sebagai Kepala Perwakilan.

2. Tata Cara Pendaftaran:

- a. Periode pendaftaran seleksi dimulai pada tanggal **5 s.d. 15 Agustus 2022**. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui tautan <https://seleksi.ombudsman.go.id/kaper2022> (dihimbau agar pelamar melakukan proses pendaftaran menggunakan PC/laptop).
- b. Pelamar wajib mengisi data diri dengan benar dan mengunggah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan.
- c. Dokumen kelengkapan administrasi yang perlu diunggah sebagai berikut :
 - 1) Asli Surat Lamaran yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp10.000) **sesuai format Panitia Seleksi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, yang dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran)*;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup yang wajib diisi dengan lengkap **sesuai format Panitia Seleksi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, yang dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - 3) Pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang **biru** (format file *jpeg/jpg*, maksimal 500 KB);
 - 4) Asli Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
 - 5) Asli atau *fotocopy* ijazah legalisir pendidikan **tertinggi** dengan kualifikasi **paling rendah** S-1 atau D-IV. Pelamar yang melampirkan *fotocopy* ijazah berlegalisir, agar menyertakan bukti kehilangan ijazah asli tersebut dari pihak yang berwenang. Bagi Pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (dijadikan dalam 1 {satu} file *pdf*, maksimal 1 MB);
 - 6) Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter pada rumah sakit pemerintah (termasuk rumah sakit TNI/POLRI) yang ditujukan untuk persyaratan Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI tahun 2022

dengan tanggal pemeriksaan kesehatan **antara tanggal dikeluarkannya pengumuman ini (3 Agustus 2022) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran seleksi (15 Agustus 2022)** (format file *pdf*, maksimal 500 KB);

- 7) Asli Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah (termasuk rumah sakit TNI/POLRI) yang ditujukan untuk persyaratan Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI tahun 2022 dengan tanggal pemeriksaan kesehatan **antara tanggal dikeluarkannya pengumuman ini (3 Agustus 2022) sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran seleksi (15 Agustus 2022)** (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 8) Asli Surat Keterangan Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif lainnya dari Badan Narkotika (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota) atau rumah sakit pemerintah (termasuk rumah sakit TNI/POLRI) yang masih berlaku **pada saat mendaftarkan diri** (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 9) Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku pada **saat mendaftarkan diri** (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- 10) Asli Surat Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan pada tahun 2022 **disampaikan pada saat pelamar dinyatakan lulus pada tes kesehatan**;
- 11) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik **sesuai format Panitia Seleksi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran)*;
- 12) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau

karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Advokat, Notaris, dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah) **sesuai format Panitia Seleksi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran)*;

- 13) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa bersedia diberhentikan sementara dari jabatan organik sebagai Pegawai Negeri Sipil dan wajib diketahui oleh atasan langsung **sesuai format Panitia Seleksi (bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil)** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran)*; dan
- 14) Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000), bahwa seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan merupakan dokumen asli yang sah dan dapat dibuktikan keasliannya **sesuai format Panitia Seleksi** (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran)*.

**Penggunaan 1 (satu) materai hanya untuk 1 (satu) surat, tidak boleh digunakan lebih dari 1 (satu) surat.*

- d. Dokumen yang diunggah dapat dibaca dan dipahami dengan jelas serta merupakan hasil pindai (*scan*) dari dokumen asli sebagaimana layaknya dokumen, bukan merupakan hasil foto dari dokumen tersebut. Dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dan tidak dapat dipahami dengan jelas, tidak akan diproses.
- e. Batas waktu unggah dokumen kelengkapan administrasi paling lambat **pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 24.00 WIB**. Unggah dokumen kelengkapan administrasi yang diterima melewati batas waktu tersebut **tidak akan diproses**.
- f. Proses pendaftaran wajib dilakukan dengan mengisi data diri dan mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada tautan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pelamar yang tidak mengisi data diri dan/atau tidak mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada

tautan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dinyatakan tidak mengikuti proses pendaftaran seleksi.

III. TAHAPAN SELEKSI

Jadwal dan tahapan kegiatan terlampir, namun sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website www.ombudsman.go.id.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Dokumen kelengkapan administrasi yang akan diproses adalah dokumen yang lengkap dan diterima sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. **Pelamar tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran secara berulang atau lebih dari 1 (satu) kali.** Pelamar wajib memastikan bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Pendaftaran yang sah dilakukan dengan mengisi data dan proses unggah dokumen dengan lengkap secara *online* dan memenuhi batas waktu periode pendaftaran.
4. Semua biaya (transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh peserta ujian dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian seleksi menjadi tanggungan peserta.
5. Tim Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia **tidak mengenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun** kepada peserta selama proses seleksi. Ombudsman Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Ombudsman Republik Indonesia atau Tim Seleksi.
6. Bagi pelamar yang merasa dirugikan karena adanya pungutan atau tawaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, agar melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui kanal pengaduan yang tersedia.
7. Setiap perkembangan informasi Seleksi ini disampaikan melalui website Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.

8. Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi selama proses seleksi terbuka apabila ditemukan kondisi sebagai berikut:
 - a. pelamar terbukti memberikan data/keterangan tidak benar;
 - b. pelamar mengonsumsi zat adiktif dan psikotropika (narkotika dan obat-obatan terlarang); dan/atau
 - c. pelamar terbukti pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
9. Dokumen kelengkapan administrasi yang telah diterima panitia menjadi milik panitia.
10. Keputusan Tim Seleksi bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Informasi lebih lanjut terkait Seleksi Kepala Perwakilan dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi melalui nomor telepon 021 225 137 137 ext 1185 atau melalui email info_seleksikaper@ombudsman.go.id.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Agustus 2022

Ketua Tim Seleksi Kepala Perwakilan
Ombudsman RI,



Wanton Sidauruk

Lampiran

Nomor : 26 TAHUN 2022

Tanggal : 03 Agustus 2022

**JADWAL SELEKSI KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran	5 s.d. 15 Agustus 2022	<i>Online</i>
2.	Seleksi Administrasi	6 s.d. 18 Agustus 2022	<i>Online</i>
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	24 Agustus 2022	Melalui website Ombudsman RI
4.	Ujian Tertulis	30 Agustus 2022	<i>Online</i>
5.	Pengumuman Hasil Ujian Tertulis	7 September 2022	Melalui website Ombudsman RI
6.	<i>Profile Assessment</i> (Penilaian Kompetensi)	13 s.d. 14 September 2022	<i>Online</i>
7.	Pengumuman Hasil <i>Profile Assessment</i> (Penilaian Kompetensi)	12 Oktober 2022	Melalui website Ombudsman RI
8.	<i>Profile Assessment</i> (Penilaian Kesehatan)	18 Oktober 2022	
9.	Pengumuman Hasil <i>Profile Assessment</i> (Penilaian Kesehatan)	26 Oktober 2022	Melalui website Ombudsman RI
10.	Ujian Wawancara	16 s.d. 17 November 2022	<i>Online</i>
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Kepala Perwakilan	23 November 2022	Melalui website Ombudsman RI
12.	Pelantikan Kepala Perwakilan	1 Desember 2022	

**sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website www.ombudsman.go.id*

Lampiran III Surat Dinas
Nomor : B/2576/KP.03.02/VIII/2022
Tanggal : 22 Agustus 2022



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN SELEKSI KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

Merujuk pada Pengumuman Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022, dalam rangka menyemarakkan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 dan memberikan kesempatan lebih luas kepada Warga Negara Indonesia, maka masa pendaftaran Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022 yang semula dibuka tanggal 5 s.d. 15 Agustus 2022 diperpanjang menjadi **tanggal 5 s.d. 29 Agustus 2022**.

Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada tautan berikut <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/anno--pendaftaran-seleksi-kepala-perwakilan-ombudsman-republik-indonesia-tahap-ii-tahun-2022>.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 2022

Ketua Tim Seleksi Kepala Perwakilan
Ombudsman RI,



Wanton Sidauruk